



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

**KECAMATAN CIGALONTANG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim
Assalamu'alaikum wr. wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2024 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera LKIP ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana

Kerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Cigalontang Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres capaian Rencana Strategis Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Penyusunan LKIP Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung capaian kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dimasa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih. Waalaikumsaam wr. wb.

Tasikmalaya, 1 Pebruari 2024

Camat Cigalontang, Ttd,

DEDI HERNIWAN, S. E.

Pembina Tk. I

NIP. 19681006 199503 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
II. Maksud dan Tujuan	1
III. Gambaran Umum Organisasi	2
IV. Isu Strategis	4
V. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
I. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	7
II. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
III. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
I. Capaian Kinerja Organisasi	30
II. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	

LAMPIRAN

1. Formulir RKPD Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
2. Formulir RKPD Perubahan Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Camat Cigalontang Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
5. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
6. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Perubahan Kecamatan Cigalontang Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi SDM Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
Tabel 1.2	Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program dan Kegiatan Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Murni Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
Tabel 2.5	Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kecamatan Cigalontang Tahun 2024
Tabel 2.6	Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Tabel 2.7	Rencana Aksi Kinerja Sasaran Perubahan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Tabel 2.8	Cascading Kinerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Tabel 2.9	Cross Cutting Kinerja Kecamatan Cigalontang kabupaten Tasikmalaya
Tabel 3.1	Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran



BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan cigalontang Kabupaten Tasikmalaya kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat capaian Renstra yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Struktur Organisasi Kecamatan Cigalontang

Struktur organisasi Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Pasal 2 yaitu terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai ASN di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya per 31 Desember 2024 terdiri dari 7 orang yang menduduki Jabatan Struktural dan 3 orang sebagai Jabatan Fungsional Umum, dengan jumlah total 10 orang, dimana idealnya jumlah ASN di Kecamatan itu adalah 8 jabatan struktural dan 13 jabatan fungsional umum sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Bezzeting Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK di Lingkungan Kecamatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih efektif. Terutama mengingat jumlah penerima layanan yang ada di Kecamatan Cigalontang lumayan banyak yaitu mencakup 16 desa. Penambahan pegawai yang berkompentenpun sangat penting dalam mendukung perwujudan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Cigalontang Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	3
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	8
		f. S2	0
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	6
		d. IV	2
4.	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional Umum	3
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cigalontang

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Cigalontang Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	1	Baik
		-	
Kendaraan			

5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	4/0/2	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1/1	Baik/Rusak
8	Laptop	2/1/1	Baik/Sedang/Rusak
9	Printer	2/2	Baik/Rusak
10	Faximile	1	Rusak
11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Rusak
13	Mesin Jilid	1	Rusak
14	Wereless	2	Rusak
15	Scanner	1	Rusak
16	Lemari	1	Rusak
17	Filling Kabinet	1	Sedang
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	1	Rusak
20	Kursi Tamu Kayu	2	Rusak
21	Tempat Tidur Kayu	1	Rusak
22	Meja Tulis	1	Baik
23	Meja Tulis	7/3	Baik/Sedang
24	Meja podium	1	Baik
25	Kursi Rapat / lipat	40/5/5	Baik/Sedang/Rusak
26	Kursi Putar	1	Baik
27	Proyektor	1	Rusak
30	Meja Rapat	2	Sedang
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Rak Arsip	1	Baik
33	CCTV	1	Rusak

IV. ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pemerintah Kecamatan cigalontang kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cigalontang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Cigalontang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari berbagai dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Cigalontang adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya pegawai di kantor Kecamatan Cigalontang sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan pegawai.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum.
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina aset desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi,
permasalahan dan solusi

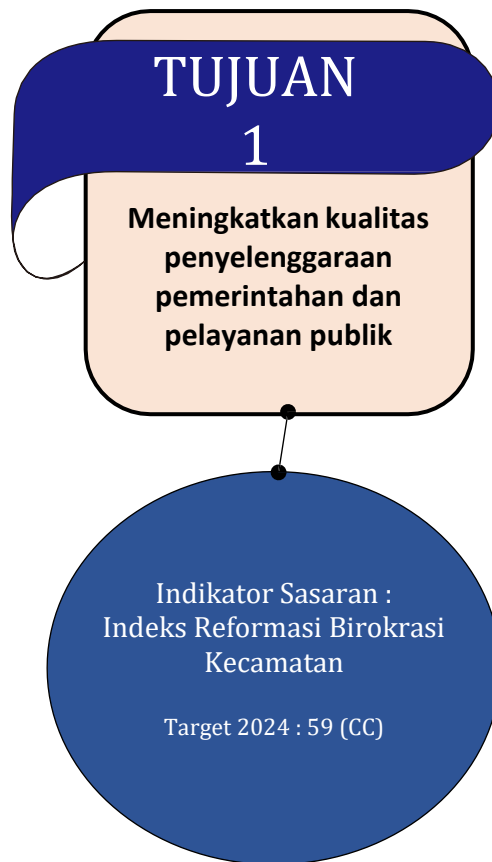
LAMPIRAN

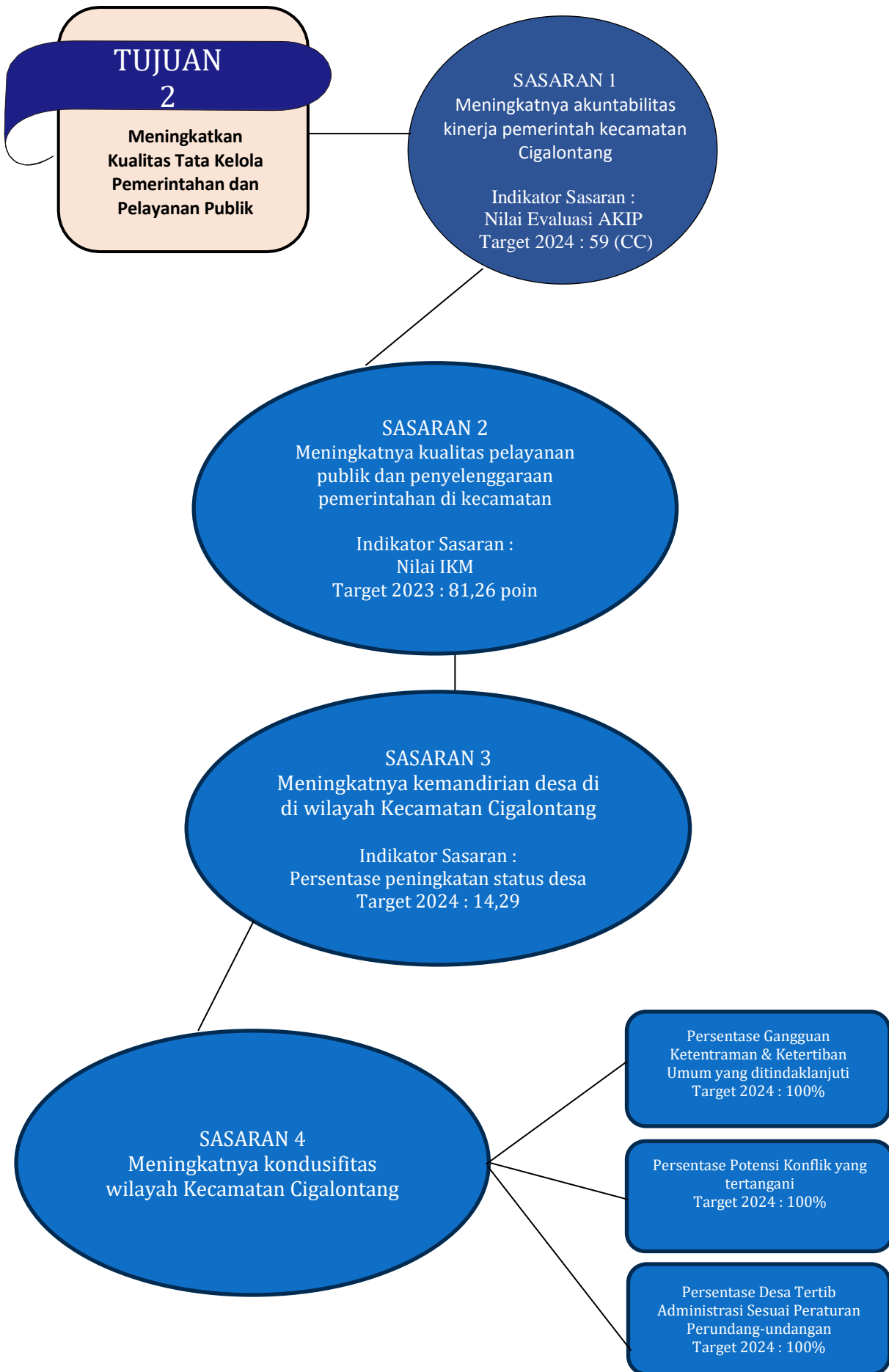


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. Rencana Strategis Tahun 2021-2026





Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kerangka perencanaan strategis Kecamatan Cigalontang adalah dengan langkah-langkah pengambilan kebijakan, program dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang diambil berkaitan dengan perencanaan strategis Kecamatan Cigalontang tertuang di dalam kerangka perencanaan Strategis Kecamatan Cigalontang adalah dengan menetapkan 5 (lima) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Sasaran antara, program dan kegiatan
Kecamatan Cigalontang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Antara	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Cigalontang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi keuangan perangkat daerah 2. Administrasi umum perangkat daerah 3. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 3. Pelaksanaan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cigalontang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini, Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD 2024, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				2.317.532.324,00
1.	S.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Cigalontang	Nilai Evaluasi AKIP	59 (CC)	
2.	S.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai IKM	81,26 Poin	
3.	S.3. Meningkatnya kondusifitas wiayah kecamatan Cigalontang	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	
		Persentase desa tertib adminisrasi sesuai perundang-undangan	100%	

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				2.515.826.292,00
1.	S.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Cigalontang	Nilai Evaluasi AKIP	59 (CC)	
2.	S.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai IKM	81,26 Poin	
3.	S.3. Meningkatnya kondusifitas wiayah kecamatan Cigalontang	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	
		Persentase desa tertib adminisrasi sesuai perundang-undangan	100%	

III. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan murni dan perubahan sebagaimana pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel. 2.4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MURNI KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	BELANJA		2.317.532.324,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.746.012.324,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.559.810.324 ,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.460.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.900.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.842.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		255.530.000 ,00	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.000.000	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.530.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		254.325.000 ,00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	254.325.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		36.665.000,00	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.665.000,00	

Tabel. 2.5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA		2.515.826.292,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.863.306.292,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.656.879.292,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.685.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.900.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.842.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		336.530.000,00	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.000.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.530.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		254.325.000,00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	254.325.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		36.665.000,00	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.665.000,00	

Dalam menyusun rencana kerja perlu juga disusun Rencana Aksi, Cascading serta Cross cutting kinerja untuk mensinkronisasikan antara visi, misi, tujuan serta sasaran strategis dalam pemerintahan Kecamatan Cigalontang.

a. Rencana Aksi

Rencana Aksi yang dimaksud adalah rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dalam satu tahun. Rencana aksi ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Cigalontang.

Rencana aksi kinerja Kecamatan Cigalontang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Per Triwulan, Program, Kegiatan dan Anggaran. Rencana Aksi ini sangat penting karena dapat membantu dalam merencanakan pencapaian target, memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

Rencana aksi kinerja Kecamatan Cigalontang sebagaimana pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel. 2.6
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN														
									Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	2	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59 (CC)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				2.317.532.324,00	SEKRETA RIAT															
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Kecamatan cigalontang	9 orang/ 12 bulan	Menginput mutasi gaji dan tunjangan pegawai, cetak gaji pegawai dan tunjangan dan pengajuan gaji dan tunjangan pegawai	1.559.810.324,00	<i>Kasubag PK</i>															

			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Kecamatan cigalontang)	1 paket/ 12 bulan	pembelian dan pemesanan peralatan dan perlengkapan kantor	57.233.000,00	Kasubag Umpeg												
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Kecamatan cigalontang)	1 paket/ 12 bulan	Pembelian dan Pemesanan Bahan Cetakan dan Penggandaan	8.200.000,00	Kasubag Umpeg												
			Terfasilitasinya kunjungan tamu (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	Memberikan fasilitas kunjungan tamu	9.600.000,00	Kasubag Umpeg												
			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	membuat surat undangan rapat koordinasi dan konsultasi	22.652.000,00	Kasubag Umpeg												
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	penggunaan jasa, penerimaan tagihan jasa dan proses pengajuan	14.500.000,00	Kasubag Umpeg												

			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	pembayaran jasa piket/keamanan	8.400.000,00	Kasubag Umpeg												
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 unit	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Kecamatan cigalontang)	75.646.000,00	Kasubag Umpeg												
					Terpelihara/terehabilitasinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Kecamatan cigalontang)	3 unit	pengecekan gedung kantor dan pemeliharaan gedung kantor	10.196.000,00	Kasubag Umpeg										
Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,26 (BAIK)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			255.530.000,00	KEPALA SEKSI												
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan	296.000.000	Kasi Pemerintahan												

			daerah dan instansi vertikal terkait (Kecamatan cigalontang)		evaluasi kegiatan															
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</i>	Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah (Kecamatan cigalontang)	1 laporan	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	15.000.000													
			<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha (Kecamatan cigalontang)	1 laporan	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	25.530.000													
Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan cigalontang	Persentase Gangguan Ketenteraman	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				254.325.000													KEPALA SEKSI

g	dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		<i>Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Terjalannya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Kecamatan cigalontang)	5 laporan	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	254.325.000	<i>Kasi Kesejahteraan Sosial</i>										
Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan cigalontang	Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000	KEPALA SEKSI										
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	1 laporan	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	25.000.000	<i>Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>										

			Indonesia (Kecamatan cigalontang)																	
Meningkat nya Kondusifit as Wilayah Kecamatan cigalontan g	Persenta se Desa Tertib Administ rasi Sesuai Peratura n Perunda ng- undanga n	100%	PROGRAM PEMBINAAN DA PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA				36.665.000	KEPALA SEKSI												
			<i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa</i>	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Kecamatan cigalontang)	2 lapora n (16 desa)	pembuata n jadwal dan tim monev, pembinaa n administ rasi, pengelola an keuangan desa dan pendayag unaan aset desa,	17.610.000	<i>Kasi Pemerint ahan</i>												

					evaluasi kegiatan															
					Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan parsitipatif (Kecamatan cigalontang)	2 laporan (16 desa)	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	19.055.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan											

Tabel. 2.7

**RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PERUBAHAN
KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
									Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59 (CC)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.515.826.292,00	SEKRETA RIAT																
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Kecamatan cigalontang	9 orang/ 12 bulan			Menginput mutasi gaji dan tunjangan pegawai, cetak gaji pegawai dan tunjangan dan pengajuan gaji dan tunjangan pegawai	1.656.879.292,00	<i>Kasubag PK</i>													
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Kecamatan cigalontang)			1 paket/ 12 bulan	pembelian dan pemesanan peralatan dan perlengkapan kantor	57.233.000,00	<i>Kasubag Umpeg</i>												
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Kecamatan cigalontang)			1 paket/ 12 bulan	Pembelian dan Pemesanan Bahan Cetakan dan	8.200.000,00	<i>Kasubag Umpeg</i>												

				Penggunaan															
			Terfasilitasinya kunjungan tamu (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	Memberikan fasilitas kunjungan tamu	9.600.000,00	Kasubag Umpeg												
			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	membuat surat undangan rapat koordinasi dan konsultasi	22.652.000,00	Kasubag Umpeg												
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	penggunaan jasa, penerimaan tagihan jasa dan proses pengajuan	14.500.000,00	Kasubag Umpeg												
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	pembayaran jasa piket/keamanan	8.400.000,00	Kasubag Umpeg												
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Kecamatan	8 unit	pengecekan kendaraan, service kendaraan dan pembayaran STNK	75.646.000,00	Kasubag Umpeg												

				cigalontang)															
				Terpelihara/terehabilitasinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Kecamatan cigalontang)	3 unit	pengecekan gedung kantor dan pemeliharaan gedung kantor	10.196.000,00	Kasubag Umpeg											
Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,26 (BAIK)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				336.530.000,00	KEPALA SEKSI											
			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Terjalannya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	296.000.000	Kasi Pemerintahan											

			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</i>	Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah (Kecamatan cigalontang)	1 laporan	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	15.000.000	<i>Kasi Pemerintahan</i>											
			<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha (Kecamatan cigalontang)	1 laporan	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	25.530.000	<i>Kasi Pemerintahan</i>											
Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan cigalontang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				254.325.000	KEPALA SEKSI											
			<i>Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Terjalannya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Kecamatan cigalontang)	5 laporan	rapat koordinasi , pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	254.325.000	<i>Kasi Kesejahteraan Sosial</i>											

g	Peraturan Perundang-undangan	HAN DESA																	
		<i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Kecamatan cigalontang)	2 laporan (16 desa)	pembuatan jadwal dan tim monev, pembinaan administrasi, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, evaluasi kegiatan	17.610.000	<i>Kasi Pemerintahan</i>												
			Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif (Kecamatan cigalontang)	2 laporan (16 desa)	rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	19.055.000	<i>Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan</i>												

b. Cascading

Dalam menyusun rencana kerja Kecamatan Cigalontang maka cascading sangat diperlukan untuk menyelaraskan target kinerja secara vertikal, dimana cascading ini adalah proses penjabaran target kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Komponen-komponen utama rencana kerja cascading adalah visi dan misi, tujuan strategis, sasaran dan indikator kinerja, aktivitas dan tanggung jawab.

Cascading kinerja Kecamatan Cigalontang digunakan untuk menyusun strategi pencapaian hasil kerja, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

Cascading kinerja Kecamatan Cigalontang sebagaimana pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel. 2.8
CASCADING KINERJA
KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2024

CAMAT CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA	
SASARAN STRATEGIS	
SS.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Cigalontang
SS.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cigalontang
SS.3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cigalontang
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
IKU.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang
IKU.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang minimal baik
IKU.3.a	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
IKU.3.b	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
IKU.3.c	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

SEKRETARIS KECAMATAN CIGALONTANG	
SASARAN	
S.1	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah
S.2	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah tercukupi sepanjang tahun
S.3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berhasil terfasilitasi secara rutin
S.4	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dirawat dengan baik
S.5	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
S.6	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	
IKI 1.	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah
IKI 2.	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah tercukupi sepanjang tahun
IKI 3.	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah berhasil terfasilitasi secara rutin
IKI 4.	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dirawat dengan baik
IKI 5.	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
IKI 6.	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
PROGRAM	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
KEGIATAN			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	1.559.810.324
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	77.460.000
3	penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	22.900.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	85.842.000

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
SASARAN		
S1.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sepanjang tahun	
S2.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sepanjang tahun	
S3.	Terfasilitasinya kunjungan tamu sepanjang tahun	
S4.	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sepanjang tahun	
S5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
S6.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor secara rutin	
S7.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan secara rutin	
S8.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	
S9.	terpenuhinya laporan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sepanjang tahun	
IKI 2.	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sepanjang tahun	
IKI 3.	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sepanjang tahun	
IKI 4.	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sepanjang tahun	
IKI 5.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
IKI 6.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
IKI 7.	Jumlah laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
IKI 8.	Jumlah laporan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
IKI 9.	Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
SUB KEGIATAN		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.200.000
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.660.000
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.400.000
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.646.000
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.196.000

SUB BAGIAN PK		
SASARAN		
S1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	
S2.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
S3.	Tersusunnya laporan hasil koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
S4.	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
IKI 2.	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
IKI 3.	jumlah laporan hasil koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
IKI 4.	jumlah laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	
SUB KEGIATAN		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.559.810.324

KASI PEMERINTAHAN		
SASARAN		
S 1.	Tercapainya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait	
S 2.	Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	
S 3.	Tercapainya urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha	
S 4.	Tercapainya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam hal fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait	
IKI 2.	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah kecamatan	
IKI 3.	Jumlah laporan urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha	
IKI 4.	Jumlah laporan hasil fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	
KEGIATAN		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	215.000.000
3	Pelaksanaan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	25.530.000
4	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.610.000

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
SASARAN		
S 1.	Tercapainya fasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	
S 2.	tercapainya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan terfasilitasinya pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	
IKI 2.	Jumlah laporan terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	
KEGIATAN		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.055.000

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
SASARAN		
S 1.	Tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam hal pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam hal pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
KEGIATAN		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	254.325.000

KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
SASARAN		
S 1.	Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
KEGIATAN		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000

c. Cross cutting

Cross cutting kinerja Kecamatan Cigalontang dibuat bertujuan untuk membantu mengidentifikasi isu kinerja secara menyeluruh, membantu memahami lingkup pekerjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target.

Tabel. 2.9
CROSS CUTTING KINERJA
KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Strategis RPJMD dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 capaian kinerja rata rata sangat tinggi.

Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1.	S.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Cigalontang	Nilai Evaluasi AKIP	59 (BB)	50,5(CC) (capaian 2023)	85,59%	Sedang
2.	S.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81,26 Poin	82,53 Poin	101,56%	Sangat Tinggi
3.	S.3. Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan Cigalontang	Persentase gangguan ketertamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase desa tertib administrasi sesuai perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Capaian Sasaran 5			97,43%	

Tabel 3.1
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Keterangan:

(*) Realisasi atau capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan sebanyak 1 (sasaran) termasuk ke dalam kategori sedang 2 sasaran dengan 4 (IKI) termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut:

SASARAN 1

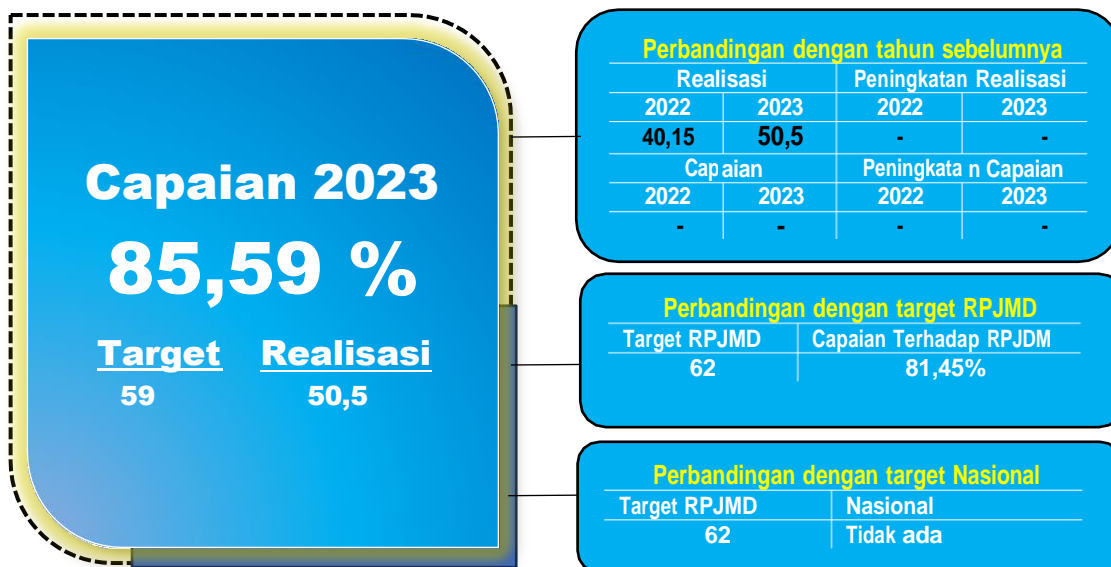
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Nilai Evaluasi AKIP

Tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Dalam mencapai tujuan ini, Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya menggunakan strategi peningkatan capaian kinerja akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Cigalontang.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan pada tahun 2024 belum dilakukan evaluasi, hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis dimana evaluasi atas implementasi SAKIP saat ini dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP.

Akan tetapi apabila dilihat dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023, Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar **50,5 poin** atau kategori CC dengan capaian 85,59%. Sedangkan untuk tahun 2022, Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai evaluasi e-SAKIP sebesar 40,15 dengan predikat C (kurang), hal ini menunjukkan bahwa nilai evaluasi AKIP tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.



Kurangnya nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan kurangnya penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan reviu program dan kegiatan pada Renja dan RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2023
- Melaksanakan evaluasi penilaian SAKIP mandiri oleh Tim Kecamatan Cigalontang
- Melakukan integrasi e-sakip dan e-kinerja

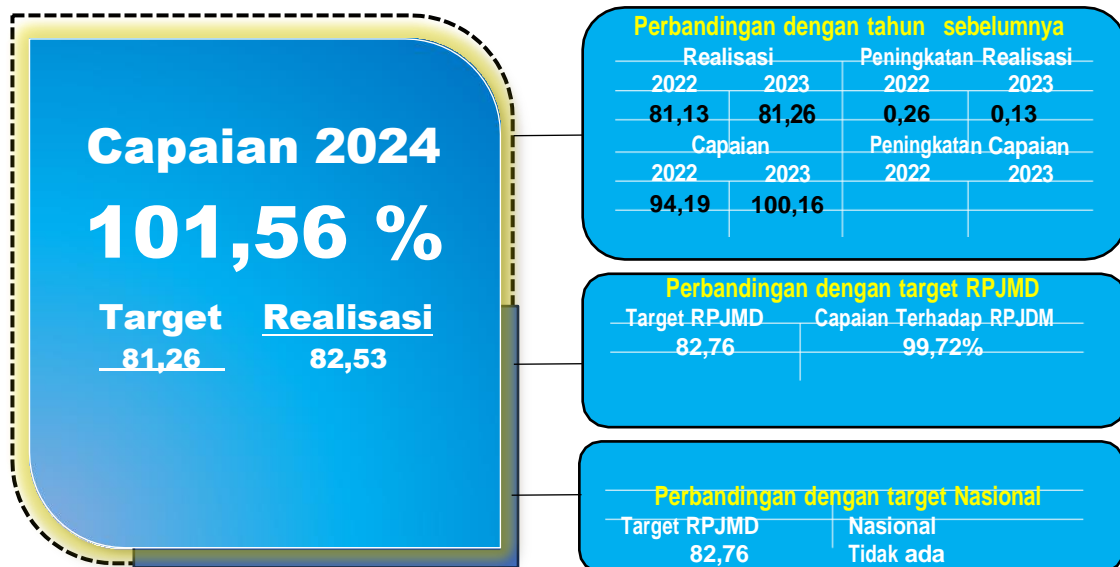
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat kabupaten Tasikmalaya bahwa pada tahun 2023 implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang cukup pada Sebagian unit kerja.

SASARAN 2
Meningkatnya Profesionalitas
Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Nilai IKM
 (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 yaitu **82,53 poin kategori baik (B)** dari target 81,26 poin dengan capaian kinerja 101,56%. Apabila di dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 81,26 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 0,13, sama halnya apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,26 Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan publik dari tahun 2022 hingga 2024.



Tercapainya target tersebut karena adanya unsur- unsur pelayanan yang dirasa sudah baik diantaranya biaya/tarif pelayanan dimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk semua jenis layanan yang berikan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya serta perilaku petugas yang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi meskipun demikian ada beberapa yang masih kurang dan perlu

peningkatan seperti prosedur pelayanan. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematisasi dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan belum cukup baik. Hal tersebut terlihat dengan masih adanya keluhan dari masyarakat yang merasakan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan.

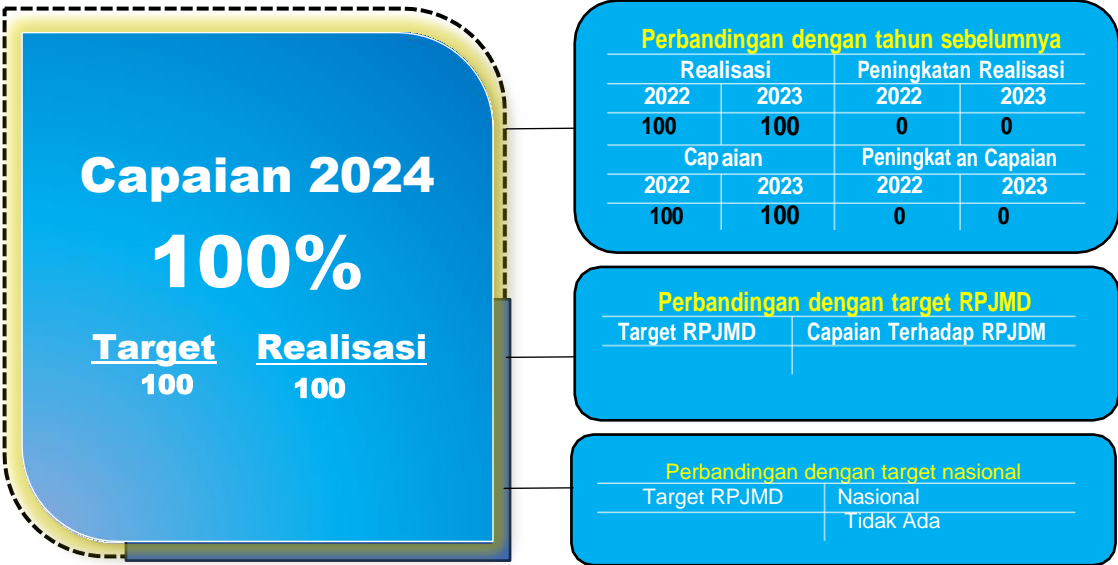
Untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya telah disusun rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan mana saja yang menjadi prioritas perbaikan.

SASARAN 3

Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Cigalontang

Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti

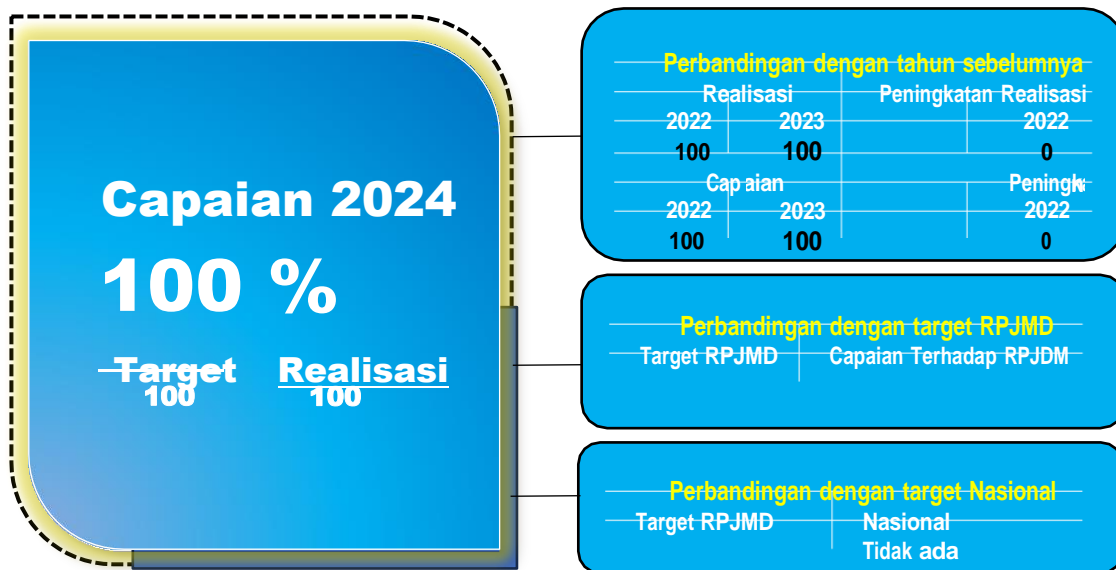
Pada tahun 2024 persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yang diperoleh Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dan pada realisasinya tercapai sebesar **100%**. Selain mencapai target yang telah ditetapkan, realisasi persentase keamanan dan ketertiban umum tahun 2024 sama capaian targetnya dengan tahun 2023 dan 2022 yaitu 100%.



Keberhasilan indikator ini dikarenakan setiap pengaduan dalam hal ketentraman dan ketertiban umum sudah dilaksanakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang ada di wilayah Kecamatan Cigalontang sehingga Kecamatan Cigalontang selalu kondusif.

Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani

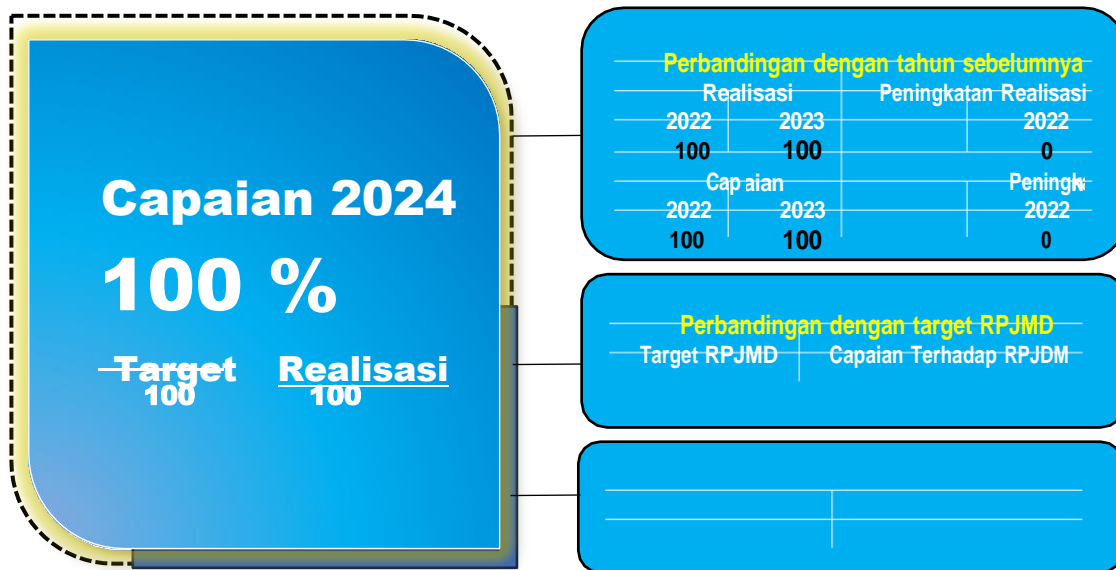
Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 dengan indikator keberhasilan Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar **100** dari target 100 dengan capaian 100%. Realisasi atas Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani tidak mengalami kenaikan dibanding dengan realisasi tahun 2023 dan 2022 atau capaiannya sama yaitu 100.



Keberhasilan indikator ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara forkompincam, Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sehingga Kecamatan Cigalontang selalu aman dan kondusif.

Persentase Desa Tertib Administrasi
Sesuai Perundang-undangan

Adapun Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Meningkatkan Kondusifitas Wilayah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 dengan indikator keberhasilan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar **100** dari target 100 dengan capaian 100%. Realisasi atas Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan sebagaimana indikator-indikator yang lainnya sama tidak mengalami kenaikan dibanding dengan realisasi tahun 2023 dan 2022 atau capaiannya sama yaitu 100.



Keberhasilan indikator ini karena telah dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa oleh pemerintah Kecamatan Cigalontang secara rutin dan berkala, sehingga permasalahan dalam hal pengadministrasian di dalam pemerintahan desa bisa segera ditemukan dan diberikan solusi.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Cigalontang tahun 2024 dan perjanjian kinerja yang ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Cigalontang secara garis besar telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi sebagaimana diuraikan dalam BAB III laporan ini di antaranya :

1. Indikator kinerja berupa Nilai Indeks Kepuasan masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan 81,26 ternyata realisasinya melebihi target yaitu 82,53, sehingga apabila dilihat dari nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan publik di Kecamatan Cigalontang memperoleh kenaikan sebesar 101,56 % dengan kategori capaian sangat tinggi.
2. Indikator kinerja berupa “ Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditidaklanjuti”, “Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani”, dan “ Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-Undangan” mencapai target yaitu 100 % dengan kategori capaian sangat tinggi

Keberhasilan dalam capaian tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kualitas dan Kompetensi SDM yang semakin meningkat
Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kecamatan Cigalontang memang menjadi salah satu kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses motivasi pembelajaran yang terus menerus dengan mengikuti berbagai diklat maka Kecamatan Cigalontang berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.
2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga dapat dicarikan jalan keluar. Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA Kecamatan Cigalontang kemudian lebih di detailkan lagi ke dalam bentuk target bulanan sehingga lebih mempermudah lagi dalam operasionalisasinya.

Dalam rangka penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan serta responsivitas gender di semua program/kegiatan, maka setiap Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) diharuskan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyusun Gender Analysis Pathway/gender Budget Statement (GAP/GBS) dan melakukan analisis resiko dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Selain itu, pada akhir tahun anggaran setiap PPTK diwajibkan menyusun laporan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) pegawai yang bersangkutan.

3. Peran Lembaga Sosial Masyarakat

Lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Cigalontang mulai dari tingkat terendah (RT, RW, Kedusunan dan Desa) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial masyarakat ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

4. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang kurang produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara lebih inklusif dibangun melalui musrenbang, dimana musrenbang tingkat kecamatan di format secara horizontal dengan membentuk beberapa klaster sehingga dengan sistem klasterisasi ini diharapkan pembahasan dan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dari masing-masing klaster dapat lebih fokus, intensif, holistik dan integratif.

5. Sinergitas antar lembaga dalam forkompimcam

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Kepala Seksi Trantibum (sebagai koordinator), Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala KUA dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi, sinergi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan.

II. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
I	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	85,59 %	1.863.306.292,00	1.646.885.026,00	216.421.266	88,39	11,61
II	Meningkatnya Profesionalitas penyelenggara pemerintah kecamatan	101,56 %	336.530.000,00	333.993.800,00	2.536.200,00	96,28	3,72
III	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Cigalontang	100 %					
1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 %	254.325.000,00	244.089.700,00	10.235.300,00	95,68	4,32
2	Persentase potensi konflik yang tertangani	100 %	25.000.000,00	24.701.000,00	299.000,00	98,80	1,2
3	Persentase desa tertib administrasi sesuai perundang-undangan	100 %	36.665.000,00	35.650.000,00	1.015.000,00	97,26	2,74
	Jumlah	487,15%	2.515.826.292,00	2.285.320.426,00	230.505.866,00	90,84	
	Efisiensi		9,16%				

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran, terdapat satu sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai target, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,16 % atau senilai Rp. 230.505.866,00 yang rinciannya sebagai berikut

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan” tercapai melalui kinerja “Nilai AKIP” sebesar 88,39% dan efisiensi anggaran sebesar 11,61%
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya profesionalitas penyelenggara pemerintah kecamatan” tercapai melalui kinerja “Nilai IKM” sebesar 96,28% dan efisiensi anggaran sebesar 3,72%
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan Cigalontang” tercapai melalui :
 - a. kinerja “Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti” sebesar 95,68 % dan efisiensi anggaran sebesar 4,32%
 - b. kinerja “Persentase Potensi Konflik Yang Tertangani” sebesar 98,82% dan efisiensi anggaran sebesar 1,2%
 - c. kinerja “Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Perundang-undangan” sebesar 97,26% dan efisiensi anggaran sebesar 2,74%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.



b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara detail memang tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan masuk kategori sangat tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

1. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti website, facebook dan instagram menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai layanan dan informasi yang diberikan oleh Kecamatan Cigalontang.

2. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Formasi pegawai Kecamatan Cigalontang berdasarkan analisis jabatan yang seharusnya 21 pegawai saat ini hanya ada 47,62% yaitu 10 orang pegawai, tentu saja ini belum memadai bagi organisasi Kecamatan Cigalontang yang memiliki wilayah desa sebanyak 16 desa, hal ini menjadi tugas dan beban yang berat dengan adanya pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks dengan adanya alokasi dana desa serta perubahan dalam mekanisme anggaran.

2.2 Kegiatan yang bersifat penjagaan

Beberapa kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang) pada beberapa obyek sulit diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telpon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja

semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

LKIP Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber Daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dan Perjanjian Kinerja Camat Cigalontang Tahun 2024. Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dari IKU yang ditetapkan, Sebagian mencapai target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat, perencanaan, monitoring dan evaluasi, peran lembaga sosial kemasyarakatan, partisipasi dan swadaya masyarakat serta sinergitas antar lembaga dalam forum komunikasi pimpinan kecamatan.

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 cukup berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 2.515.826.292,00 Dengan efisiensi sebesar 9,16 % atau senilai Rp. 230.505.866,00.

Kecamatan Cigalontang Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Next Level Reformasi Birokrasi pada dimensi Akuntabilitas Kinerja. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan.